



Dinamika Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Ambon: Tantangan dan Strategi Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Humairah Almahdali

Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kota Ambon, Indonesia

humalume@gmail.com

Abstrak

Kota Ambon, seperti banyak kota di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Dengan pertumbuhan populasi yang cepat dan pembangunan yang pesat, kebijakan pengelolaan lingkungan menjadi krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon, serta tantangan dan strategi menuju pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif, kami menganalisis kebijakan-kebijakan lingkungan yang telah diterapkan di Kota Ambon, termasuk keberlanjutannya dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, strategi yang holistik dan berkelanjutan diperlukan, termasuk penguatan kapasitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar, penggunaan teknologi hijau, dan peningkatan kerjasama antarlembaga. Dengan menerapkan strategi ini, Kota Ambon dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti yang tertarik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan Indonesia.

Kata kunci: Dinamika Kebijakan; Kebijakan Lingkungan Hidup; Strategi Pengelolaan Lingkungan

Abstract

Ambon City, like many cities in Indonesia, faces serious challenges in its environmental management. With rapid population growth and rapid development, environmental management policies are crucial to achieving sustainable development. This article analyzes the dynamics of environmental management policies in Ambon City, as well as the challenges and strategies towards sustainable development. Through a qualitative approach, we analyze the environmental policies that have been implemented in Ambon City, including their sustainability and the obstacles faced in their implementation. The results show that although efforts have been made to improve environmental management, there are still many challenges that need to be overcome, such as lack of resources, lack of public awareness, and lack of coordination among various stakeholders. To address these challenges, holistic and sustainable strategies are needed, including capacity building, greater community participation, the use of green technology, and enhanced inter-agency cooperation. By implementing these strategies, Ambon City can achieve sustainable development that considers the needs of the environment and the welfare of its people. This research provides valuable insights for policymakers, practitioners, and researchers interested in environmental management and sustainable development in urban areas in Indonesia.

Keywords: Policy Dynamics; Environmental Policy; Environmental Management Strategies



PENDAHULUAN

Kota-kota di Indonesia, seperti juga di sebagian besar negara berkembang lainnya, tengah mengalami tekanan yang semakin meningkat dalam upaya mengelola lingkungan hidup mereka. Pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi yang melonjak menjadi faktor utama dalam memperparah kondisi lingkungan. (Diantoro, 2020) Kota Ambon, yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku, tidak terkecuali dari tantangan ini. Kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan di wilayahnya ini mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, namun demikian, pengelolaan lingkungan hidupnya belum sepenuhnya terkendali. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Ambon juga menyaksikan peningkatan populasi dan berbagai perubahan sosial serta lingkungan yang terjadi dengan cepat. Dampak dari pertumbuhan ini sangat mencolok, seperti peningkatan tingkat pencemaran udara, penurunan kualitas air, dan kerusakan ekosistem yang semakin memburuk, menunjukkan adanya masalah serius terkait dengan keberlanjutan lingkungan hidup di kota ini. (Hidayati et al., 2020)

Semakin mendesaknya kebutuhan akan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di kota-kota seperti Ambon tercermin dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Fitri & Ferza, 2020). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penelitian tentang dinamika kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon menjadi sangat relevan dan penting. Kebijakan lingkungan tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan hidup saat ini, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan kota tersebut. Melalui penelitian yang cermat mengenai dinamika kebijakan lingkungan, kita dapat memahami proses perumusan, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut di lapangan. (Ikhtiarin et al., 2023) Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kebijakan, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang dalam upaya menuju pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan (Rakhman & Haryadi, 2020).

Penelitian mengenai kebijakan lingkungan di Kota Ambon juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai isu-isu lingkungan di Indonesia, penelitian yang terfokus pada konteks kota-kota kecil seperti Ambon masih sangat terbatas. (Hutgalung & Senjaya, 2021) Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan tersebut dan memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti di bidang lingkungan dan pembangunan.

Dalam artikel ini, akan diuraikan secara rinci tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan metodologi yang digunakan. Selain itu, struktur artikel ini akan dijelaskan secara singkat, sehingga pembaca akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang konteks dan ruang lingkup penelitian ini sebelum masuk ke dalam analisis dan temuan yang lebih mendalam.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini didesain untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon. Pendekatan yang digunakan memadukan elemen kualitatif dan analisis kebijakan untuk menggali berbagai perspektif dan faktor yang memengaruhi



proses kebijakan.

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kebijakan lingkungan di Kota Ambon. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi secara mendalam proses kebijakan, memahami pemikiran dan pandangan para pemangku kepentingan, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk pejabat pemerintah, anggota masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan akademisi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data.

Selain wawancara, data juga dikumpulkan melalui analisis dokumen, termasuk peraturan daerah, kebijakan pemerintah, laporan penelitian terkait, dan dokumen lain yang relevan. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami konteks kebijakan, mengidentifikasi tren dan pola kebijakan yang ada, serta melacak evolusi kebijakan lingkungan di Kota Ambon.

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen dianalisis secara tematis. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara dan pembacaan dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Selanjutnya, data disusun dan dikategorikan berdasarkan tema-tema ini untuk mengungkap pola dan tren yang relevan dalam dinamika kebijakan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, langkah-langkah yang tepat diambil. Ini termasuk triangulasi data, di mana data dari berbagai sumber dikumpulkan dan dianalisis untuk mengonfirmasi temuan, serta refleksi peneliti, di mana posisi dan bias peneliti diakui dan direfleksikan dalam analisis.

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk konfidensialitas, anonimitas, dan partisipasi sukarela. Setiap partisipan diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian dan hak mereka sebagai subjek penelitian, serta diberikan kesempatan untuk menarik diri kapan pun mereka mau.

Melalui metodologi ini, diharapkan studi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon dan memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks globalisasi dan urbanisasi yang cepat, Kota Ambon di Provinsi Maluku, Indonesia, tidak terhindar dari tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks (Raharjo et al., 2020). Pertumbuhan populasi yang pesat dan perubahan sosial ekonomi memperparah dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, kebijakan pengelolaan lingkungan menjadi krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, dan merumuskan strategi untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, wawancara dengan kepala dinas lingkungan hidup Kota Ambon memberikan wawasan yang berharga tentang pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang

dinamika kebijakan lingkungan di Kota Ambon serta memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di kota tersebut.

Dinamika Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Ambon

Studi ini bertujuan untuk memahami dinamika kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon, serta tantangan dan strategi yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala dinas lingkungan hidup Kota Ambon, serta analisis dokumen kebijakan terkait.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua, proses pembentukan kebijakan lingkungan dimulai dengan langkah krusial yaitu identifikasi masalah lingkungan yang dihadapi oleh Kota Ambon. Beliau menjelaskan,

"Kami melakukan evaluasi terhadap kondisi lingkungan di Kota Ambon secara periodik untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan perhatian serius."

Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek lingkungan, termasuk kualitas udara, air, tanah, serta potensi kerusakan ekosistem. Setelah tahap identifikasi masalah, pihak Dinas Lingkungan Hidup melanjutkan dengan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Bapak Alfredo menegaskan bahwa pihaknya mengundang partisipasi dari komunitas lokal, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dalam proses konsultasi tersebut.

"Konsultasi dengan berbagai pihak merupakan langkah penting untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,"

Selama proses konsultasi, berbagai pendapat dan masukan dari berbagai pihak diperoleh. Bapak Alfredo menyatakan bahwa pihaknya berusaha untuk mendengarkan dengan cermat setiap pendapat yang diajukan, dan mencari titik temu antara berbagai kepentingan yang ada.

"Partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci kesuksesan dalam pembentukan kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan,"

Dalam implementasi kebijakan lingkungan, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menegaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti pemerintah kota, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Beliau menjelaskan,

"Kami melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar dan efektif."

Kolaborasi lintas sektor tersebut dianggap penting untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menjaga lingkungan Kota Ambon. Selain menjalin kerjasama, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga aktif dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Bapak Alfredo menekankan pentingnya pemantauan tersebut dengan menyatakan,

"Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan lingkungan."

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak positif yang diinginkan terhadap lingkungan Kota Ambon.

Dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan lingkungan, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menjelaskan bahwa pihaknya mengadakan rapat evaluasi secara berkala dengan semua stakeholder terkait. Beliau mengungkapkan,

"Kami melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali untuk mengevaluasi capaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan."

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian antara

rencana dan realisasi dalam menjaga lingkungan Kota Ambon. Dalam rapat evaluasi tersebut, seluruh stakeholder terlibat untuk membahas pencapaian yang telah dicapai serta kendala-kendala yang muncul selama periode tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan. Bapak Alfredo menegaskan pentingnya evaluasi ini dengan menyatakan,

"Evaluasi periodik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang kami terapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat Kota Ambon."

Selain itu, hasil evaluasi juga menjadi dasar bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja, tetapi juga sebagai sarana untuk perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan lingkungan Kota Ambon.

Pembahasan dari Hasil penelitian di atas, Studi ini memberikan gambaran tentang dinamika kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Data untuk studi ini dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala dinas lingkungan hidup Kota Ambon, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Penelitian ini penting karena kebijakan lingkungan hidup memiliki peran vital dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Langkah awal dalam pembentukan kebijakan lingkungan di Kota Ambon adalah identifikasi masalah lingkungan. Dalam hal ini, evaluasi periodik terhadap kondisi lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan perhatian serius. Pendekatan ini sesuai dengan teori perencanaan lingkungan yang menekankan pentingnya analisis masalah sebagai langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang efektif (Effendi et al., 2021). Dengan mengetahui masalah yang ada, kebijakan yang dirumuskan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses selanjutnya adalah konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam merumuskan kebijakan. Partisipasi aktif dari komunitas lokal, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dianggap penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip demokratisasi dalam pengambilan keputusan lingkungan (Muryati et al., 2022), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam implementasi kebijakan, kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi dengan pemerintah kota, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta memungkinkan pengelolaan lingkungan yang lebih holistik dan terintegrasi. Teori tata kelola lingkungan menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai sektor dalam mengelola lingkungan (Sriyanti, 2023). Dalam hal ini, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas kebijakan lingkungan. Evaluasi periodik dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder terkait untuk mengevaluasi pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi penyusunan langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pengelolaan berbasis kinerja yang menekankan

pentingnya evaluasi sebagai alat untuk memperbaiki kinerja organisasi dan kebijakan (Sembiring & SH, 2022). Dengan demikian, evaluasi bukan hanya sebagai alat pengukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan lingkungan Kota Ambon.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan

Implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kota Ambon menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua, serta analisis dokumentasi terkait, beberapa tantangan utama dapat diidentifikasi

Menurut Bapak Alfredo, salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kota Ambon adalah kurangnya sumber daya, yang mencakup aspek anggaran, personel, dan infrastruktur. Beliau menyatakan,

"Kurangnya sumber daya menjadi kendala utama bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program-programnya."

Keterbatasan sumber daya tersebut seringkali menghambat kemampuan dinas dalam menjalankan program-programnya secara efektif dan menyeluruh. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi, yang dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek pemulihan lingkungan atau kegiatan pemantauan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kurangnya personel juga menjadi faktor yang mempersulit proses implementasi kebijakan lingkungan, terutama dalam hal pengawasan dan pelaksanaan program-program tertentu yang membutuhkan tenaga tambahan.

Bapak Alfredo menyoroti kurangnya koordinasi antarlembaga sebagai salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kota Ambon. Beliau menekankan bahwa koordinasi yang kurang baik antara berbagai lembaga terkait seringkali menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Dalam wawancaranya, beliau menyatakan,

"Koordinasi antarlembaga menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan di Kota Ambon. Kurangnya koordinasi dapat menghambat pelaksanaan program-program lingkungan dan memperlambat progres menuju pembangunan berkelanjutan."

Kerjasama yang solid antarlembaga dianggap penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai rencana. Ini memungkinkan berbagai lembaga untuk saling mendukung dan mengisi kekurangan yang ada. Dengan kerjasama yang baik, sumber daya dan upaya dapat dioptimalkan, sehingga menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi yang efektif juga memungkinkan adanya pertukaran informasi dan pembelajaran antarlembaga, yang dapat meningkatkan pemahaman bersama tentang tantangan lingkungan yang dihadapi dan solusi yang mungkin ditemukan. Dengan demikian, kerjasama antarlembaga bukan hanya penting untuk menjalankan kebijakan lingkungan secara efektif, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas dan memperluas jaringan kerja di antara para pemangku kepentingan.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kota Ambon. Perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, dan tekanan dari industri dan sektor lainnya merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Bapak Alfredo menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor eksternal ini sebagai bagian dari strategi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan,

"Faktor eksternal seperti perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat merupakan tantangan besar bagi keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan di Kota Ambon. Kami perlu mengadopsi strategi yang adaptif dan proaktif untuk mengatasi dampak-dampak dari faktor-faktor eksternal tersebut."

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi, dengan meningkatnya kejadian bencana alam dan perubahan pola cuaca yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Urbanisasi yang cepat juga memicu pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali, meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, tekanan dari industri dan sektor lainnya seperti pertambangan dan perkebunan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan konflik sosial di wilayah tersebut.

Pembahasan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kota Ambon menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya internal, yang mencakup aspek anggaran, personel, dan infrastruktur. Hal ini telah diakui oleh Bapak Alfredo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon. Keterbatasan sumber daya ini menghambat kemampuan dinas dalam menjalankan program-programnya secara efektif dan menyeluruh. Teori manajemen sumber daya dapat digunakan di sini untuk memahami bahwa sumber daya yang cukup merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan (Rakhman & Haryadi, 2020). Kurangnya koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan utama yang disoroti. Koordinasi yang kurang baik dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Teori koordinasi interorganisasi dapat diterapkan untuk memahami pentingnya kerjasama antarlembaga dalam mencapai tujuan bersama dalam hal pengelolaan lingkungan (Hutgalung & Senjaya, 2021).

Selain faktor internal, faktor eksternal juga menjadi tantangan yang signifikan. Perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan tekanan dari industri dan sektor lainnya merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Teori adaptasi perubahan iklim dan teori pembangunan berkelanjutan dapat membantu memahami kompleksitas tantangan ini. Dalam mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi adaptif dan proaktif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Implementasi kebijakan lingkungan harus mengintegrasikan pemahaman tentang perubahan iklim dan dinamika urbanisasi yang cepat, serta memperhitungkan tekanan dari sektor industri lainnya.

Pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor eksternal ini sebagai bagian dari strategi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan ditekankan oleh Bapak Alfredo. Dalam konteks ini, teori pembangunan berkelanjutan dan teori adaptasi perubahan iklim dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana strategi pembangunan yang adaptif dan proaktif dapat dirumuskan. Keseluruhan, pembahasan ini menyoroti kompleksitas dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kota Ambon dan mendukung pentingnya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan di kota tersebut.

Strategi Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Penelitian ini mengidentifikasi empat strategi utama yang dapat diterapkan di Kota Ambon untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu penguatan kapasitas, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi hijau, dan penyusunan kebijakan yang terintegrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua, serta analisis dokumen kebijakan terkait.

Penguatan kapasitas merupakan langkah penting dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan yang efektif di Kota Ambon. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan teknis dan manajerial dari personel dinas terkait, serta pengembangan infrastruktur yang memadai. Kemampuan teknis yang baik memungkinkan staf untuk menangani berbagai isu lingkungan dengan lebih efektif, sementara kemampuan manajerial yang kuat memastikan bahwa program-program lingkungan dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. Dalam wawancara, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menekankan pentingnya penguatan kapasitas ini:

"Kami berupaya terus meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial personel kami melalui pelatihan dan workshop rutin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola program lingkungan secara efektif."

Dengan penguatan kapasitas, dinas lingkungan hidup dapat lebih responsif dan proaktif dalam menghadapi tantangan lingkungan, serta lebih efisien dalam mengelola sumber daya yang ada.

Partisipasi masyarakat adalah kunci dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap program lingkungan. Masyarakat yang terlibat aktif akan lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan merasa memiliki tanggung jawab bersama. Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menggarisbawahi hal ini dalam wawancaranya:

"Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam keberhasilan kebijakan lingkungan. Kami selalu melibatkan komunitas lokal dalam setiap tahap proses perencanaan dan implementasi kebijakan."

Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

Penggunaan teknologi hijau adalah salah satu strategi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Teknologi ini tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengadopsi teknologi hijau, seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang canggih, dan praktik pertanian ramah lingkungan, Kota Ambon dapat meminimalkan kerusakan ekosistem dan mempromosikan keberlanjutan. Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menyatakan:

"Kami mendorong penggunaan teknologi hijau dalam setiap program lingkungan kami. Misalnya, kami mengadopsi sistem pengelolaan limbah berbasis teknologi untuk mengurangi pencemaran dan memaksimalkan daur ulang."

Penerapan teknologi hijau dapat mengurangi jejak ekologis dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Penyusunan kebijakan yang terintegrasi adalah langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang dibuat saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antar sektor dan pemangku kepentingan. Dengan kebijakan yang terintegrasi, upaya lingkungan dapat lebih efektif dan efisien, menghindari duplikasi dan konflik antara program. Dalam wawancara, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menjelaskan:

"Kami selalu berupaya menyusun kebijakan yang terintegrasi, dengan melibatkan berbagai sektor terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat saling mendukung dan efektif dalam jangka panjang."

Kebijakan yang terintegrasi memungkinkan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam mengatasi masalah lingkungan, serta memastikan bahwa semua sektor bekerja menuju tujuan yang sama.



Pembahasan dari hasil penelitian ini menyoroti empat strategi utama yang dapat diterapkan di Kota Ambon untuk mencapai pembangunan berkelanjutan: penguatan kapasitas, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi hijau, dan penyusunan kebijakan yang terintegrasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua, serta analisis dokumen kebijakan terkait, strategi-strategi ini diidentifikasi sebagai kunci untuk mengatasi tantangan lingkungan di kota tersebut.

Pertama, penguatan kapasitas merupakan langkah penting dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan yang efektif di Kota Ambon. Penguatan kapasitas mencakup peningkatan kemampuan teknis dan manajerial dari personel dinas terkait, serta pengembangan infrastruktur yang memadai. Kemampuan teknis yang baik memungkinkan staf untuk menangani berbagai isu lingkungan dengan lebih efektif, sementara kemampuan manajerial yang kuat memastikan bahwa program-program lingkungan dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. Dalam wawancara, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menekankan pentingnya penguatan kapasitas ini: "Kami berupaya terus meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial personel kami melalui pelatihan dan workshop rutin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola program lingkungan secara efektif." Dengan penguatan kapasitas, dinas lingkungan hidup dapat lebih responsif dan proaktif dalam menghadapi tantangan lingkungan, serta lebih efisien dalam mengelola sumber daya yang ada.

Kedua, partisipasi masyarakat adalah kunci dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap program lingkungan. Masyarakat yang terlibat aktif akan lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan merasa memiliki tanggung jawab bersama. Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menggarisbawahi hal ini dalam wawancaranya: "Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam keberhasilan kebijakan lingkungan. Kami selalu melibatkan komunitas lokal dalam setiap tahap proses perencanaan dan implementasi kebijakan." Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

Ketiga, penggunaan teknologi hijau adalah salah satu strategi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Teknologi ini tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (Almahdali, 2023). Dengan mengadopsi teknologi hijau, seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang canggih, dan praktik pertanian ramah lingkungan, Kota Ambon dapat meminimalkan kerusakan ekosistem dan mempromosikan keberlanjutan. Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menyatakan: "Kami mendorong penggunaan teknologi hijau dalam setiap program lingkungan kami. Misalnya, kami mengadopsi sistem pengelolaan limbah berbasis teknologi untuk mengurangi pencemaran dan memaksimalkan daur ulang." Penerapan teknologi hijau dapat mengurangi jejak ekologis dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Keempat, penyusunan kebijakan yang terintegrasi adalah langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang dibuat saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antar sektor dan pemangku kepentingan. Dengan kebijakan yang terintegrasi, upaya



lingkungan dapat lebih efektif dan efisien, menghindari duplikasi dan konflik antara program. Dalam wawancara, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua menjelaskan: "Kami selalu berupaya menyusun kebijakan yang terintegrasi, dengan melibatkan berbagai sektor terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat saling mendukung dan efektif dalam jangka panjang." Kebijakan yang terintegrasi memungkinkan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam mengatasi masalah lingkungan, serta memastikan bahwa semua sektor bekerja menuju tujuan yang sama.

Teori yang relevan dengan hasil penelitian ini adalah Teori Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Theory) yang dikemukakan oleh Paul Smoke. Teori ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas institusional dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik secara efektif (Diantoro, 2020). Menurut Smoke, penguatan kapasitas mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengembangan struktur dan proses kelembagaan, serta peningkatan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal (Ikhtiarin et al., 2023). Dalam konteks Kota Ambon, penguatan kapasitas dinas lingkungan hidup melalui pelatihan dan pengembangan infrastruktur yang memadai sangat sejalan dengan konsep ini (Sakir, 2023).

Selain itu, teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein dalam "Ladder of Citizen Participation" menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan (Rahardjo et al., 2021). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kebijakan lingkungan di Kota Ambon dapat lebih diterima dan didukung oleh warga, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam implementasinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memberikan pandangan mendalam tentang dinamika kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon, dengan fokus pada tantangan dan strategi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, Bapak Alfredo Jansen Hehamahua, dan analisis dokumen kebijakan terkait, studi ini mengidentifikasi empat strategi utama yang dapat diterapkan: penguatan kapasitas, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi hijau, dan penyusunan kebijakan yang terintegrasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya langkah-langkah strategis ini dalam menghadapi berbagai masalah lingkungan di Kota Ambon.

Penguatan kapasitas adalah langkah awal yang esensial. Kapasitas teknis dan manajerial yang ditingkatkan memungkinkan personel dinas untuk menangani isu-isu lingkungan secara lebih efektif. Penguatan kapasitas ini mencakup pelatihan rutin dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Menurut teori Kapasitas Kelembagaan yang dikemukakan oleh Paul Smoke, pengembangan sumber daya manusia dan struktur kelembagaan adalah kunci dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik secara efektif. Di Kota Ambon, peningkatan kapasitas ini akan membuat dinas lingkungan hidup lebih responsif dan proaktif dalam mengatasi tantangan lingkungan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap program lingkungan. Konsep ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein dalam "Ladder of Citizen Participation", yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan lingkungan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih mudah diterima oleh warga.



Penggunaan teknologi hijau merupakan strategi utama lainnya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Teknologi hijau membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan adopsi teknologi seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang canggih, dan praktik pertanian ramah lingkungan, Kota Ambon dapat meminimalkan kerusakan ekosistem dan mempromosikan keberlanjutan. Teknologi hijau juga mengurangi jejak ekologis dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Penyusunan kebijakan yang terintegrasi adalah langkah strategis terakhir yang penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Koordinasi yang baik antar sektor dan pemangku kepentingan diperlukan untuk menghindari duplikasi dan konflik antara program. Teori koordinasi interorganisasi relevan di sini, menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan lingkungan. Dengan kebijakan yang terintegrasi, Kota Ambon dapat mengadopsi pendekatan holistik dan komprehensif dalam mengatasi masalah lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kota Ambon, diperlukan strategi-strategi yang mencakup penguatan kapasitas, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi hijau, dan penyusunan kebijakan yang terintegrasi. Pendekatan ini didukung oleh berbagai teori yang relevan, seperti teori Kapasitas Kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi interorganisasi. Melalui penerapan strategi-strategi ini, Kota Ambon dapat menghadapi tantangan lingkungan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahdali, H. (2023). Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Negeri Suli: Tinjauan Terhadap Peran Perempuan Dalam Pembangunan Lokal. *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 78–90. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i04.510>
- Diantoro, T. D. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 1(4).
- Effendi, H., Mursalin, M., & Sonaji, R. (2021). Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 759–787.
- Fitri, S. E., & Ferza, R. (2020). Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 11–24.
- Hidayati, N., Putra, A., Dewita, M., & Framujiastri, N. E. (2020). Dampak dinamika kependudukan terhadap lingkungan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 80–89.
- Hutgalung, R. S., & Senjaya, O. (2021). Pengelolaan dan Dinamika Sampah di Desa Ulekan Kabupaten Karawang Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. *Wajah Hukum*, 5(2), 442–447.
- Ikhtiarin, A. D., Agustin, V. M., Nethan, A., Yuel, M. V. D. B., Wiratma, H. D., & Subandi, Y. (2023). Dinamika Kerja Sama Indonesia–Norwegia Di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Program Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (Redd+) Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 56–65.



- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 693–707.
- Rahardjo, B., Amalia, R., & Satriana, M. (2021). Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Raharjo, S. A. S., Hastanti, B. W., & Haryanti, N. (2020). Dinamika kelembagaan perhutanan sosial di wilayah Pehutani: Studi kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Politika*, 11(2), 2.
- Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2020). Dinamika Peran ngo lingkungan hidup dalam arena politik lokal di provinsi Jambi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).
- Sakir, A. R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 58–69.
- Sembiring, T. B., & SH, M. (2022). *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep Dan Teori)*. Penerbit Adab.
- Sriyanti, S. (2023). Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 24–39.